

Menjawab Konflik dengan Kebutuhan

Oleh : Khalid, S.H., M.Hum

BEBERAPA waktu lalu, saya membaca hasil riset JPP UGM yang dikirim oleh teman berkenaan dengan desentralisasi asimetris yang diterapkan di wilayah Aceh dan Papua. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa desentralisasi asimetris yang selama ini menjadi andalan pemerintah guna menjawab konflik yang kerap terjadi belum sepenuhnya membuahkan hasil.

Berkaitan dengan hal tersebut, Papua sendiri sampai saat ini masih terus bergolak, dikarenakan ketidakpuasan rakyat Papua terhadap kebijakan pemerintah yang memang belum dapat dirasakan oleh mereka, padahal Papua memiliki banyak kekayaan yang membuat Indonesia dikenal dunia lewat tambang mineralnya. Namun melihat kondisi Papua sungguh miris hati melihatnya, karena kontrasnya perbandingan antara kekayaan yang dimiliki dengan pembangunan yang ada dan ini yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Di tengah konflik yang terus terjadi di Papua, pemerintah terus saja enggan untuk melakukan dialog, karena takut Papua akan menuntut kemerdekaan, hal ini ibarat mengulang kembali tragedi 1999 silam dimana Timor Timur lepas dari pangkuan ibu pertiwi. Pemerintah kerap menjawab persoalan Papua dengan pendekatan yang tidak populis dan terarah seperti mengirim Menkopolkam, tentu saja ini membuat rakyat Papua menganggap pemerintah mengirim militer guna melerai masalah.

Padahal bila ditelisik lebih dalam, yang diinginkan Papua adalah dialog sehingga menimbulkan titik temu akan kebutuhan masalah yang terus terjadi.

Perbedaan Masalah

Bila pemerintah menyamakan cara penyelesaian konflik, maka hal ini adalah langkah keliru. Indonesia yang terdiri dari banyak kultur harus disamaratakan. Mengingat kembali produk hukum Orde Baru UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah yang membuat seluruh daerah harus sama sistem administrasinya, perlakuannya.

Langkah ini berakhir dengan banyaknya konflik vertikal yang timbul hampir disetiap ujung nusantara ini. Lalu konflik ini dijawab dengan Otonomi Khusus yang pada awalnya ingin diberikan pada Timor Timur melalui jajak pendapat. Namun ditolak karena tetap tidak bisa menyelesaikan masalah.

Masalah pada tiap daerah konflik sangat beragam, sesuai tuntutan yang diharapkan rakyat pada daerah tersebut. Seperti halnya Timor-Timur dengan Self Determination atau Aceh dengan Ekonomi dan Keistimewaannya dan Papua dengan Self Determination dan Ekonominya.

Untuk kasus Papua sendiri, ada

beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu masalah Ekonomi dan Self Determination. Pemerintah salah sasaran menerapkan Otonomi Khusus yang terbengkalai dalam desentralisasi asimetris pada Papua, dalam kata lain, memberikan bukan yang dibutuhkan. Terbukti, pemerintah menggelontorkan triliunan rupiah tiap tahunnya, namun hanya menjadi keuntungan pihak elit lokal, sedangkan untuk daerah pelosoknya masih belum tersentuh kemajuan. Alasan mengada memang cukup realistis, karena Pemerintah takut Papua lepas seperti Timor Timur, maka pemerintah tidak mau campur tangan lebih dalam, lagi pula aset Freeport harus tetap jalan.

Menjawab dengan Kebutuhan

Bila yang diminta kemajuan ekonomi, maka hal ini harus didiskusikan dalam artian tidak juga selalu memberikan apa yang dibutuhkan tanpa evaluasi terlebih dahulu. Beberapa pertimbangan mungkin perlu diperhatikan yaitu alasan Historis dan Yuridis sendiri. Yogyakarta juga pernah meminta status Istimewa yang hilang selama Orde Berkuasa, namun banyak pihak pada parlemen menolak karena alasan daerah lain akan meminta hal yang sama.

Sebuah pernyataan tidak beralasan sebenarnya. Indonesia bukan negara kesatuan, namun negara persatuan (lihat Sila 3 Pancasila) namun pemerintah mungkin masih berfikir seperti Orde Baru, dimana setiap daerah harus sama dan tidak boleh berbeda, dan juga harus diatur oleh mekanisme yang sama oleh pemerintah pusat. Pernyataan "konyol" ini dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI atau hanya agar dapat memobilisasi daerah-daerah dengan sumberdayanya.

Bila hal seperti ini terus dipertahankan, cepat atau lambat banyak daerah-daerah yang tidak puas akan segera bertindak, ibarat membiarkan "bom waktu" meledak jika saaatnya tiba.

Catatan ini perlu diketahui, pertama perbedaan budaya kita yang menyatukan kita, bukan persatuan budaya yang menyatukan. Rasanasionalisme bisa berubah haluan menjadi nasionalisme etnisitas jika model seperti saat ini terus dipertahankan. Menjawab konflik dengan kebutuhan bukan merubah sistem pemerintahan menjadi federasi, namun lebih membuka jalan Otonomi seluas-luasnya diterapkan dengan bijak dalam implementasinya.

Dengan demikian keberagaman tetap diakui dan keutuhan NKRI tetap terjalin hingga kembali menimbulkan semangat nasionalisme yang kuat pula seperti pada era penjajahan, dimana setiap daerah dengan semangat melawan satu musuh yaitu kolonialisme. ***

Penulis adalah Dosen Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara.